

# UJICоба MODEL PEMERINGKATAN KELUARGA DI DUSUN PLASA JENAR DESA KENTENG, KECAMATAN PRUWANTORO, KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA TENGAH

Haryati Roebyantho

## ABSTRAK

Masih ditemukan kendala dalam program penanganan kemiskinan terutama pada tahapan sosialisasi program, mekanisme pelaksanaan, efektifitas, kemanfaatan dan dampak. Di sisi lain ditemukan penyebab ketidakpuasan masyarakat karena pemilihan program tidak sesuai dengan kenyataan (belum terjaminnya akurasi data). Hal tersebut disebabkan proses pendataan masih bersifat top down dengan metode pengumpulan data survey. Dikaitkan dengan paradigma yang berkembang yaitu memprioritaskan pemberdayaan masyarakat maka muncul asumsi bahwa apabila pemilihan sasaran program melibatkan partisipasi masyarakat maka manfaat dan keberhasilan program akan optimal. Oleh karena untuk melaksanakan seleksi sasaran program yang tepat dan sesuai dengan keinginan dan pengetahuan masyarakat maka pada tahun 2006 dilakukan ujicoba "Model Pemeringkatan Keluarga" di kabupaten Wonogiri.

Dasar pemikiran metode ini disarankan sebagai metode seleksi sasaran program adalah dengan melibatkan masyarakat akan menumbuhkan kemampuan dan aktualisasi masyarakat sehingga meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola program. Penentuan lokasi secara purposive berdasar pertimbangan lokasi tersebut merupakan lokasi pelaksanaan KUBE-SKPA tahun 2007 dan merupakan lokasi prioritas Pembangunan Kesejahteraan Sosial tahun 2007. Oleh sebab itu berdasarkan kesepakatan tim dengan instansi terkait maka ditentukan Dusun Plasa Jenar berdasarkan pertimbangan dusun tersebut memiliki jumlah penduduk antara 150-200 Kepala Keluarga yang bermukim di tujuh (7) RT dan dua (2) RW.

Tujuan ujicoba model adalah untuk melihat sejauhmana model ini dipahami masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan pentahapan, mendefinisikan konsep miskin sesuai pendapat dan pandangan lokal/masyarakat, menganalisis mekanisme pelaksanaan ujicoba Model. Indikator keberhasilan : masyarakat memahami konsep ujicoba apabila masyarakat dapat membuat pemetaan keluarga berdasar kondisi sosial ekonomi, menyusun konsep miskin, dan masyarakat mampu menyimpulkan apa manfaat kegiatan ujicoba model

Pembahasan analisis ujicoba model menunjukkan bahwa: Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa Model pemeringkatan ini aplikatif dalam arti Penjelasan dan pelatihan tim fasilitator mudah dipahami masyarakat dengan dibuktikan Tim Pemeringkat (perwakilan masyarakat) mampu melaksanakan tahapan model Pemeringkatan sesuai dengan modul. Tim Pemeringkat mampu membuat pemetaan keluarga berdasarkan kondisi sosial ekonomi, mampu menyusun konsep miskin berdasarkan pendapat mereka sendiri, menghitung nilai dan memperingkatkan keluarga berdasarkan hasil perhitungan nilai rata-rata.

## 1. LATAR BELAKANG

Upaya penanganan Kemiskinan di Indonesia telah banyak dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta. Namun hasil penelitian beberapa pakar menyebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan mengalami beberapa kendala antara lain : (1) Orientasi pembangunan menekankan pertum-

buhan ekonomi sehingga belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbagai lapisan; (2) Kebijakan terpusat dan bersifat top down dengan metode trickle down effect sehingga pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berputar pada golongan ekonomi tertentu; (3) Memposisikan masyarakat sebagai obyek sehingga tidak menyentuh

kemampuan masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki; (4) Kemiskinan mempunyai karakter yang berbeda antar wilayah satu dengan lain sehingga asumsi permasalahan kemiskinan tidak boleh dianggap sama dan berlaku semua.

Mengacu dari beberapa kendala di atas, maka perlu adanya suatu perombakan dalam penanggulangan kemiskinan. Salah satunya adalah pemberlakuan otonomi dalam penanggulangan kemiskinan dengan acuan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional (SPKN) sebagai penyelesaian masalah, yang disesuaikan dengan karakter dan kondisi wilayah masyarakat tersebut. Juga menyikapi tuntutan globalisasi khususnya peningkatan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Inisiatif.

Hasil evaluasi Subsidi Langsung Tunai (SLT) kerjasama antara Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) LPPM-Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat R.I menemukan salah satu faktor penting dalam Penanganan Program Kemiskinan adalah masih ditemukannya kendala dalam mengimplementasikan kebijakan Penanganan Kemiskinan terutama pada tahapan: Sosialisasi Program, Mekanisme Pelaksanaan, Efektifitas, Kemanfaatan dan Dampak.

Isue yang berkembang di masyarakat sebagai dampak pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Subsidi Langsung Tunai (SLT) adalah bentuk perilaku kekerasan fisik terhadap pelaksanaan program karena ketidakpuasan masyarakat, khususnya dalam penentuan dan pemilihan sasaran program (masyarakat miskin). Mencermati penyebab ketidakpuasan masyarakat salah satunya adalah kurang tepatnya sasaran program dan masih diragukannya akurasi data kelompok miskin yang akan diberdayakan. Selama ini proses pendataan yang dilakukan lebih bersifat *top down* dengan metoda pengumpulan data secara *survey*. Sehingga seringkali muncul berbagai persoalan yang menyebabkan ketidaksesuaian antara data dengan kondisi riil di masyarakat. Hal tersebut menimbulkan suatu asumsi bahwa upaya mencapai keberhasilan penanganan kemiskinan di Indonesia salah satunya adalah

menyediakan data yang akurat dan menentukan metode yang tepat dalam pemilihan sasaran program.

Menurut Tuhana, dkk (2006) terdapat enam (6) pendekatan dalam program penanganan kemiskinan yakni : (1) Keterpaduan; (2) Kegotong-royongan; (3) Keswadayaan; (4) Pemberdayaan ; (5) Desentralisasi dan (6) Masyarakat sasaran. Adapun paradigma yang sedang berkembang adalah Paradigma Pemberdayaan sehingga hampir semua kebijakan dan Program Penanganan Kemiskinan menggunakan pendekatan pemberdayaan. Oleh karena itu terdapat asumsi Keberhasilan Program Penanganan Kemiskinan adalah dengan pemberdayaan masyarakat miskin artinya masyarakat ikut terlibat langsung dari awal kegiatan sampai akhir secara berkesinambungan (*suitanabilit*). Oleh karena itu, maka pada tahun 2006 akan diujicobakan "Model Pemeringkatan Keluarga Menurut Kondisi Sosial Ekonomi".

Model Pemeringkatan Keluarga Menurut Kondisi Sosial Ekonomi merupakan suatu metode atau teknik dalam menentukan sasaran program Penanganan Kemiskinan yang melibatkan masyarakat dalam menentukan kelompok/golongan warga miskin sesuai persepsi dan pendapat masyarakat tersebut atau lebih tepatnya model ini digunakan sebagai tahapan pelaksanaan seleksi calon kelompok binaan dan seleksi lokasi pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)-Fakir Miskin.

Model Pemeringkatan Keluarga Menurut Kondisi Sosial Ekonomi mengadopsi dari *Participatory Wealth Ranking (PWR)*. PWR merupakan salah satu metode pendekatan yang dikembangkan oleh *The Small Enterprise Foundation (SEF)* dan *Credit and Saving for the Hard - Core Poor (CASHPOR)* untuk melakukan pemeringkatan keluarga menurut kondisi sosial ekonominya. Metode ini digunakan bersifat *participatory* yakni suatu metode pendekatan yang mengakui hubungan sosial dan nilai realitas pengalaman, pikiran dan perasaan masyarakat. Pokok pikiran penting yang terkandung dalam pendekatan ini adalah: (1) Adanya keterlibatan dari warga masyarakat; (2) Mengutamakan kebijakan lokal (*local wisdom*) dalam menentukan sasaran program; (3) Adanya kesepakatan bersama dalam

mengadakan pemeringkatan keluarga menurut kondisi sosial ekonominya.

Dasar pemikiran mengajukan "Model Pemeringkatan Keluarga Menurut Kondisi Sosial Ekonomi" sebagai tahapan seleksi sasaran program dan seleksi lokasi mengacu dari tulisan Mulyanto tentang alasan melibatkan partisipasi masyarakat antara lain : (1) Akan menumbuhkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat; (2) Meningkatkan tersedianya lingkungan yang kondusif bagi aktualisasi potensi dan pertumbuhan manusia; (3) Merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah; (4) Sebagai pencerminan hak-hak demokratis. Individu hendaknya dilibatkan dalam pembangunan.

Pemilihan lokasi secara metodologis menggunakan cara *purposive sampling* berdasarkan wilayah yang dijadikan (1) Lokasi KUBE dengan sistem Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) tahun 2007, (2) Lokasi prioritas bagi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah, (3) Wilayah pemukiman yang memiliki jumlah penduduk antara 150 – 200 Kepala Keluarga, (4) Desa miskin, (5) Belum pernah dilakukan pemeringkatan keluarga oleh LSM atau NGOS. Berdasarkan ketentuan di atas maka atas dasar kesepakatan tim fasilitator (Tim Peneliti Puslitbang Kesos, Badiklit, Departemen Sosial), tim pendamping Daerah (staf Bina Program Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Wonogiri), Staf Kecamatan, Petugas Sosial Kecamatan (PSK) Purwanto, kepala-kepala dusun dari Kecamatan Purwanto maka dipilih Desa Kenteng (KUBE-SKPA 2007) di dusun Plasa Jenar (hanya dilaksanakan di tujuh (7) RT atau dua (2) RW-01/05; 02/05; 03/05; 04/05; 01/06; 02/06/03/06).

Pelaksana Ujicoba "Model Pemeringkatan Keluarga Menurut Kondisi Sosial Ekonomi" terdiri dari Tiga (3) komponen yaitu : Tim Fasilitator (dua orang peneliti Puslitbang Kesos, Badiklit, Departemen Sosial); Tim Pendamping terdiri satu orang Staf Bina Program Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah, Staf tata Usaha Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Wonogiri, Petugas Sosial Kecamatan Purwanto); Tim Pemeringkat (10

orang perwakilan 7 RT 2 RW). Pelaksanaan "Model Pemeringkatan Keluarga Menurut Kondisi Sosial Ekonomi" dibagi menjadi 4 tahapan yakni : (1) Persiapan; (2) Pelaksanaan (3) Penghitungan Nilai (4) Workshop/diskusi.

Tujuan "Model Pemeringkatan Keluarga Menurut Kondisi Sosial Ekonomi" adalah: (1) Menganalisis sejauhmana metode ini dapat dipahami oleh Tim Pemeringkat/masyarakat; (2) Mendefinisikan konsep miskin berdasarkan persepsi atau pandangan masyarakat setempat; (3) Menganalisis mekanisme pelaksanaan ujicoba model. Manfaat yang diharapkan adalah metode dengan pendekatan partisipatori sebagaimana uraian di atas dapat dijadikan sebagai metode dasar/tahapan awal pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Miskin sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.

Indikator keberhasilan sebagai dasar analisis adalah ujicoba "Model Pemeringkatan Keluarga Menurut Kondisi Sosial Ekonomi" antara lain :

1. Pelaksana Daerah/Pendamping daerah (petugas Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi, Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Wonogiri, Petugas Sosial Kecamatan Purwanto), memahami mekanisme pelaksanaan ujicoba "Model Pemeringkatan Keluarga Menurut Kondisi Sosial Ekonomi" terutama memahami tugas dan fungsi sebagai pengarah dan fasilitator, mengamati dan mengobservasi jalannya tahapan ujicoba sesuai dengan modul serta mencatat permasalahan sebagai bahan diskusi/workshop.
2. Tim Pemeringkat (perwakilan masyarakat) memahami penjelasan tentang modul/acuan "Model Pemeringkatan Keluarga Menurut Kondisi Sosial Ekonomi"

Dan melaksanakan tahapan sesuai urutan sebagai berikut: membuat kartu dan nomor urut keluarga; pemetaan keluarga, menyusun konsep miskin, menyortir kartu serta memberikan nilai; menghitung rata-rata dan menentukan pemeringkatan keluarga; memperingkatkan keluarga sesuai dengan konsep miskin yang sudah mereka susun, menyimpulkan manfaat pelaksanaan ujicoba bagi kepentingan masyarakat dan instansi daerah.

Mekanisme Pelaksanaan: pelaksanaan pembuatan kartu, pemetaan, penyusunan konsep miskin dilaksanakan oleh seluruh tim pemeringkat (10 orang) secara bersama-sama. Kemudian ditentukan skor tertinggi 100 diberikan pada kelompok masyarakat yang paling kaya/berada/mampu dan skor 1 diberikan pada kelompok termiskin/paling miskin. Dalam menentukan skor dan menghitung nilai (Pelaksanaan penyortiran kartu) tim pemeringkat dibagi 3 kelompok dan setiap keluarga dinilai oleh ketiga kelompok tadi sehingga obyektifitas penilaian dapat dicapai.

Dampak pelaksanaan ujicoba konsep "Model Pemeringkatan Keluarga Menurut Kondisi Sosial Ekonomi" dianalisis dari bahan sekunder dan hasil workshop/diskusi antara Tim Fasilitator, Tim Pendamping Daerah, Tim Pemeringkat, Instansi Pemda terkait dan Lembaga Sosial Masyarakat yang menangani Program Kemiskinan.

## II. MODEL PEMERINGKATAN KELUARGA MENURUT KONDISI SOSIAL EKONOMI

Model Pemeringkatan Keluarga Menurut Kondisi Sosial Ekonomi adalah suatu konsep model pendekatan yang bersifat partisipatori untuk mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi keluarga menurut pendapat dan persepsi masyarakat yang bersangkutan. Program ini diharapkan menjadi replikasi yang nantinya dapat digunakan sebagai metode penentuan sasaran program.

Untuk mengetahui sejauhmana model tersebut dapat diaplikasikan maka pada tulisan ini dibatasi pada pembahasan tentang pemahaman pelaksanaan dalam implementasi modul dan pelaksanaan model beserta dampak dan kendala sebagai berikut :

### A. Pelaksanaan Ujicoba Model Pemeringkatan Keluarga menurut Kondisi Sosial Ekonomi

Pelaksana ujicoba model dibedakan menjadi tiga komponen yakni :

#### 1. Fasilitator

Petugas yang menyusun konsep model, menyusun modul (pedoman

pelaksanaan ujicoba), memonitoring Pendamping daerah dan tim Pemeringkat, menganalisis dan memberikan rekomendasi tentang pelaksanaan ujicoba (Peneliti Puslitbang Kesos, Badiklit Kesos, Departemen Sosial R.I.

#### 2. Pendamping daerah

Petugas yang mendampingi Tim fasilitator, memberikan pengarahannya kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan ujicoba, memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan konsultasi antara tim fasilitator dengan instansi terkait di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa, memfasilitasi pelaksanaan workshop/diskusi di tingkat kecamatan/kabupaten/provinsi.

#### 3. Tim Pemeringkat

Perwakilan dari masyarakat berdasarkan kriteria : (1) penduduk yang telah bertempat tinggal minimum 5 tahun berturut-turut; (2) mengenal kondisi seluruh desa dan aktif dalam kegiatan masyarakat; (3) keterwakilan dari semua wilayah, usia, status ekonomi, kelompok masyarakat.

### B. Model Pemeringkatan Keluarga menurut Kondisi Sosial Ekonomi

#### 1. Tahap persiapan :

a. Pertemuan koordinasi dan konsultasi di tingkat provinsi untuk menyampaikan tujuan penelitian; menentukan lokasi ujicoba; mengumpulkan data sekunder (desa miskin, program penanganan kemiskinan, di tingkat provinsi dan menentukan 1 orang tim pendamping daerah.

b. Pertemuan koordinasi dan konsultasi di tingkat kabupaten, untuk menentukan lokasi berdasar kebijakan pemerintah kabupaten dan menentukan 1 orang pendamping. Menyusun jadwal kegiatan dan konsultasi rencana adanya workshop.

c. Mengidentifikasi desa miskin dan menentukan wilayah yang ber-

penduduk sekitar 150-200 Kepala Keluarga.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Diskusi/pertemuan di tingkat kecamatan: untuk memperkenalkan diri (instansi peneliti bekerja); menyampaikan maksud dan tujuan ujicoba model; memilih tim pemeringkat sesuai kriteria, menyusun jadwal kegiatan.
- b. Pertemuan dengan tim pemeringkat dan staf kelurahan/desa untuk memperkenalkan diri, menjelaskan tentang tujuan diujicobakan model pemeringkatan keluarga, dijelaskan tahapan dan mekanisme pelaksanaan pemeringkatan keluarga berdasarkan sosial ekonominya, persiapan alat tulis seperti: spidol berwarna kecil dan besar, kertas plano, selotip, pulpen, penghapus, stapler dan lain-lain.
- c. Pembuatan kartu berisi nama kepala keluarga, isteri, pekerjaan dan nomor ( mengisi form 1).
- d. Pemetaan berdasarkan tempat kepala keluarga yakni menggambarkan kotak sebagai simbol rumah dari keluarga tersebut.
- e. Penyusunan konsep miskin dan mengisi form 2.
- f. Mensortir kartu dan dikategorisasikan ( mengisi form 3). Cara sortir, diskusi dengan kelompok (3-4 orang) untuk menentukan kategorisasi kepala keluarga dan memberikan alasan dalam menempatkan kartu di dalam tumpukan (Form 3)
- g. Melakukan *cross chek* apakah kategorisasi kartu sesuai konsep miskin, perbedaan penilaian antara kelompok satu dengan lainnya, (mengisi form 4) . Pedoman konsistensi penghitungan: jika maksimum skor berbeda 25 maka *unreliable* dan di coba didiskusikan dan apa alasannya, dan jika skor yang *unreliable* kurang dari 10% diabaikan tetapi kalau lebih didiskusikan dan

ditiadakan apabila skor masih belum berubah.

3. Menghitung hasil

- a. Memasukkan skor (mengisi form 5).

Berdasarkan buku panduan PWR, untuk menentukan nilai dilihat terlebih dahulu berapa jumlah tumpukan dihasilkan. Ditentukan bahwa nilai 100 diberikan pada kelompok masyarakat yang sangat miskin. Dan nilai 1 diberikan pada kelompok kaya. Untuk menentukan skor dihitung dengan cara:

Tumpukan X = 100 : tumpukan X x jumlah tumpukan yang dihasilkan = nilai

Misal tumpukan ada 5 dengan demikian nilai :

Tumpukan 5 = 100 : 5 x 5 = 100

Tumpukan 4 = 100 : 5 x 4 = 80

Tumpukan 3 = 100 : 5 x 3 = 60

Tumpukan 2 = 100 : 5 x 2 = 40

Tumpukan 1 = 100 : 5 x 1 = 20

Dengan demikian tumpukan 5 nilainya 100.

- b. Menghitung rata-rata skor akhir.

Menghitung rata-rata skor adalah untuk menetapkan peringkat keluarga.

Rumus yang digunakan untuk menghitung caranya :

Nilai skor terendah + nilai skor di atasnya

2

Cara menghitung :

Tumpukan ada 5 maka skor terendah 20 dan skor tertinggi 100. Untuk menghitung rata-rata skor akhir yaitu:

Peringkat 1 = 20 + 40 : 2 = 30

Peringkat 2 = 40 + 60 : 2 = 50

Peringkat 3 = 60 + 80 : 2 = 70

Peringkat 4 = 80 + 100 : 2 = 90

Peringkat 5 = 90 >

c. Menetapkan pemeringkatan keluarga

Dalam menetapkan peringkat keluarga dihitung terlebih dahulu hasil rata-rata penilaian 3 kelompok Tim pemeringkat. Dasar yang digunakan pemeringkatan keluarga ditentukan sebagai berikut:

Peringkat I = keluarga yang mendapat nilai 20 - 30

Peringkat II = keluarga yang mendapat nilai 31 - 50

Peringkat III = keluarga yang mendapat nilai 51 - 70

Peringkat IV = keluarga yang mendapat nilai 71 - 90

Peringkat V = keluarga yang mendapat nilai 91 >

### III. PELAKSANAAN UJICoba MODEL PEMERINGKATAN KELUARGA MENURUT KONDISI SOSIAL EKONOMI

Pelaksanaan ujicoba Model Pemeringkatan Keluarga Menurut Kondisi Sosial Ekonominya di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan secara keseluruhan di Dusun Plasa Jenar, Desa Kenteng, Kecamatan Purwanto, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan ujicoba dilakukan selama 10 hari (1 hari konsultasi di Provinsi, 1 hari konsultasi di Kabupaten Wonogiri, Konsultasi di Kecamatan Purwanto, 1 hari persiapan pertemuan di Kecamatan Purwanto dan memilih desa, 1 hari persiapan, 1 pembuatan kartu dan pemetaan, 2 hari mengisi form 3, menyusun konsep miskin penyortiran, 2 hari penghitungan nilai dan pemeringkatan; 1 workshop/ diskusi di kecamatan.

#### A. Persiapan

Tim Fasilitator melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Dinas Provinsi Kesejahteraan Sosial yang diterima oleh Kepala Bagian Bina Program untuk menyampaikan beberapa hal :

1. Sesuai dengan kesepakatan pada saat pelaksanaan penajagan lokasi (*advance*)

tahun 2006 maka Kabupaten Wonogiri sesuai dengan kriteria (Lokasi Prioritas Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Jawa Tengah, lokasi KUBE-SKPA 2007 dan belum pernah ada program penanganan kemiskinan oleh NGOS Asing) maka dijadikan lokasi ujicoba "Model Pemeringkatan Keluarga Menurut Kondisi Sosial Ekonominya".

2. Menyampaikan tujuan kegiatan ujicoba dan menjelaskan konsep model yang akan di ujicobakan serta menyusun konsep miskin sesuai dengan persepsi dan pandangan masyarakat.
3. Berdasarkan pedoman buku manual PWR lokasi yang akan dijadikan lokasi adalah desa miskin, berpenduduk sekitar 150-200 Kepala Keluarga.
4. Bersama-sama dengan masyarakat mengidentifikasi seluruh keluarga serta membuat pemetaan tempat tinggal masyarakat, memperingkatkan keluarga berdasar kondisi sosial ekonomi.

Berdasarkan kriteria di atas maka di antara 24 kecamatan di wilayah Kabupaten Wonogiri dipilih satu yakni Kecamatan Purwanto yang merupakan lokasi prioritas Pembangunan Kesejahteraan Sosial untuk tahun 2007. Kecamatan Purwanto terdiri dari 13 desa/ kelurahan, meliputi 62 dusun/lingkungan, 101 RW atau 355 RT.

Selanjutnya Tim fasilitator dan pendamping daerah menuju ke kantor kecamatan Purwanto yang diterima oleh Petugas Sosial Kecamatan sebagai wakil Bapak Camat. Disaat pertemuan dijelaskan tujuan dari kedatangan tim antara lain:

- a. Mengidentifikasi seluruh keluarga yang bermukim di satuan wilayah dusun dan menggolongkan ke dalam peringkat sesuai kondisi sosial ekonominya;
- b. Mendiskripsikan konsep miskin sesuai pendapat dan pengetahuan masyarakat;
- c. Mengidentifikasi permasalahan kesejahteraan sosial.

Adapun manfaat kegiatan ini bagi dusun Plasa Jenar antara lain :

- a. Warga masyarakat memiliki pengetahuan tentang cara pendataan Kepala Keluarga sesuai kenyataan yang ada
- b. Warga secara bersama-sama mendefinisikan konsep miskin
- c. Melalui kegiatan ini kemungkinan ditemukan permasalahan kesejahteraan sosial dan potensi kesejahteraan sosial yang belum tercatat oleh petugas Badan Pusat Statistik Sosial.

Pendekatan yang digunakan bersifat *participatory* yakni melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemeringkatan. Selanjutnya dibentuk tim pemeringkat yang terdiri dari tokoh masyarakat, dukuh, petugas BKKBN, guru dan masyarakat yang mewakili keluarga miskin, dan pengusaha home industri.

Pertemuan dilanjutkan untuk memilih dusun yang akan dijadikan lokasi. Staf desa Kenteng memberikan informasi bahwa Desa Kenteng terdiri dari 4 dusun. Salah satunya adalah dusun Plasa Jenar memiliki penduduk sekitar 205 Kepala Keluarga. Dusun Plasa Jenar meliputi 7 RT atau 2 RW. Informasi lainnya yang digunakan untuk lokasi SKPA adalah dusun Kenteng. Namun jumlah penduduk sekitar 250-300 Kepala Keluarga. Hasil kesepakatan berdasarkan beberapa usulan akhirnya menyetujui ditetapkan dusun Plasa Jenar akan dijadikan lokasi. Dan menetapkan tim pemeringkat yaitu: Kinto, Purwanto, Paryono, Sarsito, Jaimin, Ripijati, Jokoastomo, Parmin, Siswoyo dan Winarni.

## B. Pelaksanaan ujicoba model

Pelaksanaan ujicoba model diawali dengan pertemuan antara tim fasilitator, Tim Pendamping Daerah dan Tim Pemeringkat dilaksanakan pada hari ke tiga. Dalam kesempatan itu fasilitator mengemukakan beberapa hal :

1. Menjelaskan bahwa Tim Fasilitator merupakan Tim Peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial

yang diberi tugas untuk melaksanakan suatu kegiatan, dimana kegiatan tersebut akan dilakukan secara bersama-sama oleh Tim Pemeringkat yang telah ditunjuk.

2. Menjelaskan bahwa penentuan dusun Plasa Jenar dipilih tidak ada kaitannya dengan program Bantuan Departemen Sosial namun bersifat acak dengan memilih lokasi program Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah.
3. Kegiatan ini merupakan kegiatan ujicoba suatu metode untuk menentukan sasaran program sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat, sehingga kegiatan ini tidak berlanjut dengan pemberian bantuan tetapi memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk melaksanakan pendataan dan pemetaan.
- d. Dilakukan *cross chek* maka Tim pemeringkat terdiri dari: (1) penduduk yang telah bertempat tinggal minimum 5 tahun berturut-turut; (2) mengenal kondisi seluruh desa dan aktif dalam kegiatan masyarakat; (3) keterwakilan dari semua wilayah, usia, status ekonomi, kelompok masyarakat.
- e. Diberikan penjelasan tentang tahapan kegiatan dan sebelumnya akan di susun terlebih dahulu jadwal dan menentukan tempat untuk pelaksanaan kegiatan.

Belum selesai menjelaskan keseluruhan tahapan ada beberapa anggota tim pemeringkat mengusulkan bahwa tempat diadakan di rumah Bapak Kepala Dusun ( di sana disebut Pak Pala) dan karena bulan puasa maka jadwal dimulai jam 14.00 sampai 16.30 (di akhiri dengan buka bersama) dan setelah sholat Taraweh dilanjutkan yakni jam 20.00 – 23.00 WIB.

Pendamping daerah juga menyetujui hal tersebut. Menurut mereka untuk tidak membuang waktu penjelasan tentang tahapan pelaksanaan model tidak perlu

namun kini dijelaskan saja satu persatu apa yang harus dikerjakan. Tim Fasilitator mencoba mengarahkan dengan menjelaskan bahwa semua Tim Pemeringkat dan Pendamping Daerah harus mengetahui secara keseluruhan tahapan model yang akan diujicobakan. Pekerjaan ini membutuhkan ketekunan dan ketelitian serta mekanisme tahapan harus jelas.

Karena suara terbanyak menyetujui cara yang diusulkan maka tim fasilitator menyetujui dengan menjelaskan pertama kali yang harus dilakukan adalah membuat daftar nama Kepala Keluarga sesuai dengan form 1. Setelah mengisi form 1 maka dibuat pemetaan berdasarkan form 1. Setelah disetujui maka pimpinan rapat diprakarsai oleh seorang warga yang berstatus guru, menjelaskan bahwa setiap RT membuat daftar nama sesuai form 1. Sementara itu bapak sekretaris desa membuat peta dusun Plasa Jenar sesuai hasil tim KKN-UGM 2 bulan yang lalu.

Akhirnya salah seorang tim pemeringkat berinisiatif bahwa setiap RT membuat daftar nama keluarga. Setelah selesai masing-masing RT menyalin daftar nama yang di kertas ke kertas plano dengan diberi kotak untuk satu kepala keluarga. Fasilitator menjelaskan pemetaan adalah menggambarkan letak tempat tinggal warga di kertas plano. Setiap kotak untuk satu Kepala Keluarga. Namun apabila dalam satu rumah ada dua atau lebih Kepala Keluarga maka kotak harus dibagi dua atau tiga dan diberi nomor urut semua. Contoh Bapak Kepala Dusun memiliki anak yang sudah menikah dan masih tinggal dalam satu rumah maka gambar kotak dibagi 2 dan diberi nomor urut 1 dan 2, demikian seterusnya. Setelah mendapat penjelasan tersebut, ternyata kelompok yang lain juga mengerjakan hal sama, sehingga diputuskan untuk mengulang kembali penyusunan nomor urut dan Daftar Kepala Keluarga.

Pada saat pemetaan terjadi permasalahan. Ketika pemetaan tiba di

dusun yang berada ditengah-tengah, nomor urut yang sudah dibikin berdasar RT tidak bisa diteruskan karena nomor urut di daftar form 1 dengan ruang peta yang disediakan tidak cukup dan nomor urut jadi berantakan. Padahal pemetaan telah dilaksanakan oleh 3 RT satu RW. Demikian pula saat dilakukan *cross check* dalam menggambar tempat tinggal. Gambar peta hanya untuk keluarga yang memiliki Kartu Kepala Keluarga sedangkan menurut peserta yang lain di rumah tersebut ada seorang janda (mertua) dari Kepala keluarga.

Fasilitator lalu mengarahkan dan menjelaskan bahwa itu diberi tanda sendiri dan memiliki Kartu Keluarga sendiri. Ketika dilakukan wawancara mendalam pada warga dan aparat desa, disebutkan bahwa biasanya bila ada Kepala Keluarga tambahan pada Kartu Kepala Keluarga yang lama, aparat belum mengubah dan memberikan Kartu Kepala Keluarga baru, sehingga pada saat pemetaan pemetaan hampir selesai separuh, terdapat beberapa kepala keluarga yang tidak terdaftar.

Oleh karena itu berdasarkan kesepakatan pembuatan peta diulang lagi dengan cara membuat daftar nama dan nomor urut Kepala Keluarga, selanjutnya menggambarkan letak tempat tinggal Kepala Keluarga di atas kertas plano (sesuai arahan fasilitator) dengan dimulai dari tempat kegiatan dilaksanakan. Akhirnya pemetaan keluarga dimulai dari RT 01 RW 05. Satu orang (ketua RT) membuat kotak pada kertas plano, satu lainnya membacakan nama Kepala Keluarga dan lainnya membuat kartu berisi nama Kepala Keluarga dan nomor urut. Pada saat pemetaan selesai, beberapa anggota tim pemeringkat mengusulkan untuk memberikan warna pada kotak sesuai dengan tingkat peringkat keluarga.

Selanjutnya disepakati untuk mendiskusikan konsep "miskin" menurut pandangan dan persepsi warga dusun Plasa Jenar. Hasil diskusi tentang konsep miskin menurut masyarakat adalah

melihat siapakah yang dimaksud dengan orang miskin, bagaimana kondisi rumah mereka, bagaimana cara mereka memutuskan untuk menjaga kesehatan keluarga, pekerjaan, pemilikan rumah dan biaya sekolah anak. Menurut warga Plasa Jenar untuk pengisian form 6 (kategori/klasifikasi keluarga berdasarkan konsep miskin) nilai terendah (nilai 1) diberikan pada keluarga yang paling miskin dan nilai tertinggi (nilai 5) diberikan pada keluarga yang dianggap kaya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pada modul PWR. Namun karena ini merupakan kesepakatan dan kehendak masyarakat maka kategori warga desa yang akan digunakan.

Berdasarkan kesepakatan dalam diskusi tentang konsep "miskin" sebagaimana pengisian form 6 maka diketahui bahwa:

- Tumpukan 1 : disebut sangat miskin, kriteria yang masuk adalah janda tidak punya rumah atau punya rumah, tidak punya pekerjaan dan masih punya anak kecil.*
- Tumpukan 2 : disebut miskin, adalah warga yang memiliki pekerjaan tidak tetap, ikut orang tua, mertua, memiliki rumah tetapi tidak punya pekerjaan dan masih punya anak kecil.*
- Tumpukan 3 : disebut cukup mampu dengan ketentuan mereka adalah masyarakat yang memiliki lahan, anak sudah berumah tangga atau janda ikut anak tetapi tidak punya pekerjaan tetap, atau kelompok masyarakat yang memiliki rumah tanpa mampu menyekolahkan anak.*
- Tumpukan 4 : disebut mampu, warga yang memiliki pekerjaan tetap/ pengusaha tahu atau pematung, mempunyai motor, mobil, memiliki lahan, bisa menyekolahkan anak sampai SMA serta janda pensiunan atau duda produktif.*
- Tumpukan 5 : disebut sangat mampu adalah warga yang memiliki rumah, memiliki tanah, mobil mempunyai penghasilan tetap, bisa menye-*

*kolahkan anak sampai SLTA/PT, status pekerjaan sebagai PNS, memiliki usaha toko, tahu, patung, dan home industries.*

Penyortiran/pemilahan kartu berdasarkan kriteria miskin menurut masyarakat dilaksanakan bersama-sama. Tim Pemeringkat (10 orang) berdasarkan keterwakilan tempat tinggal, status ekonomi, kegiatan dalam masyarakat dibagi menjadi 3 kelompok kecil (Kelompok A = 4 orang; kelompok B = 4 orang dan kelompok C = 3 orang).

Proses penyortiran kartu, satu orang menulis dan mengisi form 3 (menulis nomor urut berdasarkan pemetaan, nama dan termasuk dalam tumpukan mana serta menuliskan alasan penempatan keluarga pada tumpukan tersebut), satu orang mengambil dua kartu untuk didiskusikan bersama dan menumpuk kartu berdasarkan kriteria yang sama. Pelaksanaan penyortiran kartu dilakukan tiga (3) kali artinya setiap kelompok menyortir 343 warga dusun Plasa Jenar. Alasan pemberian nilai pada keluarga sebanyak tiga (3) kali diperuntukkan setiap keluarga mendapatkan penilaian seobyektif mungkin.

### C. Penghitungan nilai/score dan melakukan pemerinkatan

Proses perhitungan nilai dilaksanakan oleh masing-masing kelompok di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda dengan mengisi form 5 (Form daftar nilai keluarga) dengan urutan nomor urut sesuai pemetaan keluarga, nama lengkap, nama panggilan, hasil penilaian kelompok, jumlah penilaian dari ketiga kelompok dan penghitungan nilai rata-rata.

Tahap awal perhitungan nilai dimulai dengan setiap kelompok mengisi form 5 yakni mengkategorikan keluarga berdasarkan kriteria keluarga yang sudah disepakati warga dusun Plasa Jenar. Berdasarkan kesepakatan semua kelompok kategorisasi keluarga di dusun Plasa Jenar dibedakan dalam lima (5) kelompok. Kelompok sangat miskin di nilai 1 dan kelompok sangat mampu di nilai 5.

Pada saat penyortiran kartu terdapat perbedaan sebutan. Setiap kelompok memiliki sebutan berbeda, terutama untuk sebutan nilai 3, nilai 4 dan nilai 5. Melihat kenyataan tersebut maka dilakukan diskusi dan dicapai kesepakatan sebutan yang akan digunakan sama untuk setiap kelompok yakni : Nilai 1 *sangat miskin*; nilai 2 *miskin*; nilai 3 *cukup*; nilai 4 *mampu* dan nilai 5 *sangat mampu*. Selain itu diketahui juga bahwa dalam menentukan kategorisasi keluarga tidak sepenuhnya berdasarkan konsep yang sudah disepakati semula (form 2). Hasil wawancara mendalam diketahui bahwa dalam penentuan kriteria keluarga masih dipengaruhi kepentingan kelompok, dipengaruhi pemikiran bahwa penentuan kriteria ini akan digunakan untuk menentukan program pemerintah tahun 2007 terutama penanganan kemiskinan.

Pelaksanaan tahap perhitungan dilakukan dengan memasukkan score terlebih dahulu ke kolom nilai 5. Skor ditentukan nilai terendah 1

miskin, nilai 60 untuk keluarga dengan kategori cukup, nilai 80 untuk kategori keluarga kaya dan nilai 100 untuk kategori keluarga sangat kaya.

Selanjutnya setiap kelompok mengisi kolom nilai pada form 7. Caranya memindahkan nilai tumpukan ke skor. Perhitungan skor akhir dilakukan dengan cara membandingkan apakah ketiga kelompok yang melaksanakan penilaian sudah konsisten artinya tidak ada perbedaan penilaian lebih dari 25. Apabila dalam penilaian terdapat nilai lebih dari 25 akan dicoba didiskusikan kembali dan apabila jumlah nilai yang berbeda lebih dari 10% maka penilaian keluarga tersebut dianggap tidak konsisten dan keluarga dikeluarkan dari daftar. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan keakuratan data keluarga.

Hasil penentuan score di dusun Plasa Jenar digambarkan per dusun sebagaimana tabel 1 berikut ini:

Tabel 1  
Distribusi score berdasarkan lokasi

Score	RT I/5	RT II/5	RT III/5	RT IV/5	RT I/6	RT II/6	RT III/6	Total
Sama	16	16	14	18	18	15	11	102
Beda satu	40	26	29	33	22	25	25	200
Beda dua	7	1	6	10	7	1	3	35
Jumlah	63	43	49	61	47	41	39	343

Sumber : Data primer 2006.

dan nilai tertinggi 100. Dalam menentukan skor berdasarkan kesepakatan mereka nilai paling rendah diberikan pada keluarga yang termasuk kategori miskin dan nilai tertinggi diberikan pada keluarga kaya. Hasil perhitungan sesuai kategorisasi diketahui bahwa warga dusun Plasa Jenar dikelompokkan menjadi 5 sehingga didapat rincian nilainya sebagai berikut:

$$\text{Tumpukan 5} = 100 : 5 \times 5 = 100$$

$$\text{Tumpukan 4} = 100 : 5 \times 4 = 80$$

$$\text{Tumpukan 3} = 100 : 5 \times 3 = 60$$

$$\text{Tumpukan 2} = 100 : 5 \times 2 = 40$$

$$\text{Tumpukan 1} = 100 : 5 \times 1 = 20$$

Dalam diskusi untuk menentukan skor pada setiap kategorisasi keluarga, diperoleh suara terbanyak menyetujui bahwa untuk nilai 20 diberikan pada keluarga yang masuk kategori sangat miskin, nilai 40 pada kategori keluarga

Dari tabel berikut dapat diketahui bahwa ketiga kelompok tim pemeringkat menilai sama terhadap 102 Kepala keluarga atau 29,73%. sedang hasil penilaian kelompok beda satu nilai ada 200 Kepala Keluarga atau 58,30%. Dengan demikian perbedaan penilaian dua kelompok ada 11,07% atau terdapat dua kelompok menilai beda terhadap 35 Kepala Keluarga. Sebagaimana terlihat tabel 1 di atas, penilaian terhadap Kepala Keluarga RT IV/5; RT I/5; RT I/6 dan RT III/5 berbeda oleh dua kelompok dari tiga kelompok kecil yang dibentuk mengisyaratkan bahwa dalam penilaian terhadap kepala keluarga masih dipengaruhi oleh kepentingan kelompok. Ketika dilakukan wawancara mendalam dan dicermati hasil penilaian yang berbeda tersebut menunjukkan bahwa perbedaan nilai dilakukan dengan menempatkan keluarga pada kategori lebih rendah dari yang seharusnya. Hal ini dipengaruhi adanya pemikiran bahwa apabila

mereka berada di tingkat rendah maka mereka akan mendapatkan bantuan pemerintah dimasa mendatang. Padahal setelah di observasi langsung ke lapangan terdapat beberapa orang memiliki usaha tahu atau tempe/patung.

Perhitungan rata-rata score akhir dalam menetapkan peringkat keluarga dengan menggunakan perhitungan :

$$\frac{\text{Nilai skor terendah} + \text{Nilai skor diatasnya}}{2}$$

Diketahui bahwa hasil kategorisasi terhadap warga dusun Plasa Jenar ada 5 kategori dengan demikian hasil peringkat terhadap keluarga nilainya adalah : Peringkat I = 30; Peringkat II = 50 Peringkat III = 70 Peringkat IV = 90 ; Peringkat V = 91 atau lebih. Mengacu dari hasil pemeringkatan maka rata-rata score hasil perhitungan terhadap Keluarga Dusun Plasa Jenar adalah :

- Peringkat I = 10 - 30
- Peringkat II = 31 - 50
- Peringkat III = 51 - 70
- Peringkat IV = 71 - 90
- Peringkat V = 91 >

Dari hasil perhitungan rata-rata maka dapat diketahui kondisi sosial ekonomi warga dusun Plasa Jenar sebagai berikut: Terdapat 70 Kepala Keluarga atau 20,41% termasuk peringkat I atau sangat miskin. Mereka terdiri dari janda memiliki rumah atau numpang di rumah anak/menantu; serta tidak memiliki pekerjaan tetap. 150 Kepala Keluarga atau 43,73% termasuk peringkat II atau miskin. Mereka adalah warga yang tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak memiliki rumah/ menumpang di rumah anak/mertua/orang tua dan memiliki anak kecil. Ada 89 Kepala Keluarga atau 0,25% termasuk peringkat Cukup yakni mereka yang memiliki lahan, anak-anak sudah berumah tangga, atau janda ikut anak tetapi tidak punya pekerjaan tetap, memiliki rumah dan mampu menyekolahkan anak. 27 Kepala Keluarga lainnya terdapat dalam peringkat IV yakni kategori Mampu. Mereka memiliki pekerjaan tetap sebagai pengusaha patung, pengusaha tahu, memiliki rumah, motor, memiliki lahan, bisa menyekolahkan anak sampai SLTA serta janda pensiunan atau duda produktif. Kelompok masyarakat yang termasuk dalam kategori V yakni dianggap sangat mampu (hanya ada di RW 5- 4 RT) yakni mereka yang memiliki rumah, memiliki tanah, memiliki mobil, mempunyai penghasilan tetap, bisa menyekolahkan anak sampai tingkat SLTA/ PT, status Pegawai Negeri Sipil, memiliki usaha toko/tahu/patung/home industries.

Tabel 2  
Hasil Pemeringkatan Keluarga berdasar score rata-rata

Peringkat	RT I/5	RT II/5	RT III/5	RT IV/5	RT I/6	RT II/6	RT III/6	Total
I	14	10	8	10	11	11	6	70
II	21	14	23	24	25	21	22	150
III	18	15	13	17	9	8	9	89
IV	9	3	4	7	1	1	2	27
V	1	1	1	3	1	0	0	7
Jumlah	63	43	49	61	47	41	39	343

Sumber : Data primer 2006.

## IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan gambaran pelaksanaan uji coba "*Model Pemeringkatan Keluarga Menurut Kondisi Sosial dan Ekonomi*" di dusun Plasa Jenar, Desa Kenteng, Kecamatan Pruwantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah secara garis besar dapat disimpulkan :

1. Model yang diujicobakan aplikatif dalam arti proses pelaksanaan dari tahap persiapan sampai penghitungan nilai dengan mudah dikerjakan oleh penduduk setempat dengan arahan fasilitator dan pendamping daerah.
2. Tim Pemeringkat (perwakilan warga dusun) mampu memahami dan mengerti penjelasan dari fasilitator. Implementasi tahapan model sudah mengikutsertakan partisipasi perwakilan warga, sehingga setiap ada kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan tahapan model selalu didiskusikan dan diambil keputusan yang berdasarkan kesepakatan bersama.
3. Metode dalam seleksi sasaran program dengan menggunakan "*Model Pemeringkatan Keluarga Menurut Kondisi Sosial dan Ekonomi*" dalam kenyataan memperoleh data akurat tentang kondisi masyarakat dan jumlah nyata Kepala Keluarga. Hal ini dibuktikan bahwa pada saat persiapan yakni dalam penentuan lokasi, dikatakan oleh aparat desa bahwa penduduk dusun Plasa Jenar ada 205 namun ketika di daftar dengan menggunakan "*Model Pemeringkatan Keluarga Menurut Kondisi Sosial dan Ekonomi*" diketahui bahwa jumlah Kepala Keluarga di dusun Plasa Jenar ada 343.

4. Pada saat workshop di Kecamatan, Tim pemeringkat (perwakilan warga) menyatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi warga dusun Plasa Jenar. Karena dengan adanya pemetaan keluarga maka akan diketahui data yang benar tentang kondisi sosial ekonomi warga dan bila ada program bantuan pemerintah maka tidak akan salah sasaran karena kita mengetahui kondisi setiaparganya.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka disarankan beberapa hal :

1. Dalam pelaksanaannya harus dipertegas dan diperjelas tugas dan peran antara Tim Fasilitator, Tim Pendamping dan Tim Pemeringkat. Hal ini penting karena untuk melaksanakan secara benar metode partisipatif, yaitu melibatkan warga masyarakat dan Tim Fasilitator dan Tim Pendamping tidak boleh ikut terlibat dalam diskusi.
2. Apabila Model ini akan dijadikan Replikasi maka harus diperhatikan beberapa hal yakni:
  - a. Fokus arahan dalam menyusun konsep harus dikaitkan dengan program yang akan dilaksanakan;
  - b. Dalam pemilihan tim pendamping daerah harus benar-benar orang yang memiliki pemahaman dan pengetahuan metode participatory;
  - c. Dalam pemilihan Tim pemeringkat harus betul-betul memperhatikan kriteria yang sudah dikemukakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam azis, Nazru, *Kemiskinan dan kegelisahan Sayogyo, Sosok*, Harian Kompas, 23 Mei 2006.
- Agusta.Ivannovich, *Kelemahan metode Survey, Artikel*, Harian Kompas, 11 maret 2006.
- Anonim , 2005, *Panduan Penyusunan Database Program Pemberdayaan Fakir Miskin (DP2FM)*, Jakarta, Departemen Sosial R.I.
- Anonim, 2005, *Modul Pelatihan Konsep dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta, Departemen Sosial.
- Anonim, 2005 *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional*, Jakarta, TKP3KPK Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- David S Gibbon dkk., 1999, *Cashpor self Operational Manual : Cost Effectiveness targeting*, the Small Enterprise Foundation, South Africa.
- Hartiningsih, Maria, 2004, *Solusi Birokrat Membiayai Pembangunan Manusia*, Kompas, 9 September 2005.
- Mudiyono dkk, 2005, *Dimensi Masalah Sosial dan Pemberdayaan Masyaraakt*, APMD Press Yogyakarta.
- Moelyarto Tjokrowinoto, 2002, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar ,Yogyakarta.
- Wisnu Hidayat dkk., *Kebijakan dan manajemen, Pembangunan Partisipatif*, Penerbit YPAPI, Yogyakarta.

### BIODATA PENULIS :

Haryati Roebyantho, Alumnus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Sosiatri. Kini Ajun Peneliti Madya pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI.